



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAH TENGAH

KATA PENGANTAR

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan prasyarat utama bagi setiap instansi pemerintah dalam mewujudkan aspirasi masyarakat serta mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang tepat, jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut, serta berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025**.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2025.

Selain sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja, LKIP ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mendorong peningkatan kualitas kinerja dan perwujudan *Good Governance* secara berkelanjutan. Dalam konteks yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 merupakan media akuntabilitas kinerja kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta kepada masyarakat.

Akhir kata, dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam penyusunan laporan ini. Semoga LKIP ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan evaluasi serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Palangka Raya, Januari 2026

**Pt. KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



MUHAMAD RUS'AN, S.Hut, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIK 19730923 200312 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Bab I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Gambaran Umum Organisasi	4
E. Isu-Isu yang Dihadapi	7
F. Sistematika Penulisan	9
Bab II. Perencanaan Kinerja	
A. Perencanaan Kinerja.....	11
B. Visi.....	11
C. Misi.....	11
D. Perjanjian/Penetapan Kinerja.....	16
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	19
B. Realisasi Anggaran.....	75
Bab IV. Penutup	
A. Kesimpulan.....	77

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, tertulis bahwa laporan kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Instansi yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 ditegaskan bahwa Kepala PD selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Kinerja dan menyampaiakannya kepada Gubernur / Bupati / Walikota dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas beserta pasal-pasal yang telah disebutkan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan.

Selain berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah juga kepada masyarakat atau publik.

B. Dasar Hukum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dan dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor DPA/A.1/1.05.8.01.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2025, tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.
18. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor DPPA/A.3/1.05.8.01.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 22 Oktober 2025, tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan kegiatan dan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasinya.
2. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada masyarakat.
3. Sebagai dasar untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program, dan kegiatan periode yang akan datang.
4. Untuk penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Gambaran Umum Organisasi

1. Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2013 Badan Kesatuan Bangsa mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada tahun 2018 diperbarui dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Tugas, fungsi dan Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka tugas, fungsi dan struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

a. Tugas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Gubernur dalam Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Kesatuan bangsa dan

Politik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

- 1) Perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia pada Badan;
- 3) Perumusan penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis;
- 4) Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 5) Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- 7) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

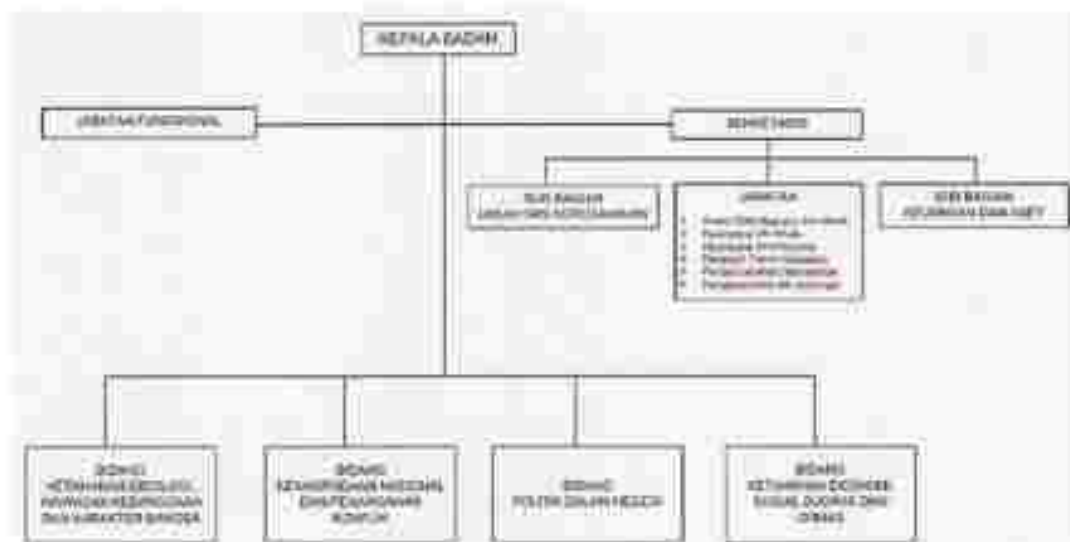
3. Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; kemudian Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah; dan terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan :

- 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
 - f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah



E. Isu-Isu Strategis Yang Dihadapi

Kalimantan Tengah dengan ibukotanya adalah Kota Palangka Raya terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota memiliki luas 153.564,5 km² dan berpenduduk sekitar 2.784.971 jiwa, (sumber data : Wikipedia 2024).

Dengan luasan wilayah tersebut Provinsi Kalimantan Tengah didiami berbagai macam suku bangsa dari seluruh wilayah di Indonesia. Suku asli dan dominan di Kalimantan Tengah yaitu Suku Dayak sedangkan suku dominan lainnya yakni Suku Banjar dan Suku Jawa. Dari

segi agama di Provinsi Kalimantan Tengah juga terdapat 5 agama nasional yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu serta terdapat kepercayaan lokal yakni Kaharingan yang merupakan kepercayaan penduduk asli Kalimantan Tengah.

Adanya keanekaragaman suku, budaya, agama dan partai politik serta berbagai jenis kelembagaan tersebut menjadikan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai daerah yang cukup rawan terjadinya perselisihan antar suku dan agama serta gesekan-gesekan yang berpotensi terjadinya konflik.

Masalah ketentraman dan ketertiban umum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kehidupan politik yang diarahkan untuk mewujudkan demokrasi masih dimaknai sebagai kebebasan semata oleh sebagian masyarakat yang seringkali dapat mengganggu kelompok masyarakat lainnya yang mempengaruhi kondisi ketentraman dan ketertiban umum. Dalam aspek hukum, penegakkan hukum yang lemah dan tidak konsisten mempengaruhi pula kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Permasalahan keamanan dan ketertiban umum yang ditemui adalah masih tingginya jumlah tindak pidana di Provinsi Kalimantan Tengah. Data menunjukkan pada tahun 2024 jumlah tindak pidana kriminalitas di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 4.897 kasus (Sumber data : Polda Kalteng).

Upaya penurunan konflik dilakukan dengan melakukan pemilihan strategi, kebijakan, dan program yang tepat dengan meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan dan organisasi (mitra kerja) yang dibentuk untuk keperluan tersebut seperti Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Sekecil apapun isu yang berpotensi menimbulkan konflik yang berdasarkan hasil deteksi dini akan ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan atau aksi dalam

pencegahan dini. Namun demikian jika konflik terjadi maka akan diusahakan agar cepat diselesaikan secara optimal agar tidak berdampak luas.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

a. Pendidikan politik masyarakat masih rendah

Dapat dilihat dari menurunnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilukada di Kalimantan Tengah serta potensi konflik-konflik yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilukada.

b. Harmonisasi kehidupan bermasyarakat cenderung menurun

Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan semakin maraknya *conflict and communal violence* (konflik dan kekerasan komunal) di tengah masyarakat, seperti tawuran antar warga dan pertentangan antar komunitas/kelompok masyarakat.

c. Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat

Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya, dan ekonomi memunculkan elses-elses negatif dengan munculnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusakan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional dan transnasional.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini adalah berikut ini :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, beserta gambaran umum organisasi dan juga sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025 antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan Gubernur Kalimantan Tengah.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menguraikan tentang capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja serta anggaran dan realisasi yang digunakan dalam mewujudkan outcome kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran-lampiran

1. Dokumen Perjanjian Kinerja,
2. Rencana Aksi Pelaporan Kinerja,
3. Pohon Kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Dalam pencapaian kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan rencana strategis yang mana pada hakekatnya merupakan suatu program kerja yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana jangka menengah atau lebih dikenal sebagai Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Perangkat Daerah juga sebagai tolak ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun, dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program Kepala Daerah.

B. Visi

Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJMD tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut: **"Kalimantan Tengah Makin BERKAH : Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis"**.

C. Misi

Misi Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 sebagaimana terdapat dalam uraian bawah ini :

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi
4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya-Saing
5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

Dalam hal ini, tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah yang terkait langsung dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, adalah sebagai berikut:

1. Misi ke 2 **"Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global"**.

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rawan bencana. Beberapa bencana yang sudah pernah terjadi, seperti bencana Tanah Longsor, Banjir, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kebakaran Gedung dan Permukiman, Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung dan Gelombang genangan air pasang ROB), Kegagalan Teknologi, Epidemi dan Wabah Penyakit maupun bencana sosial. Dalam rangka penguatan dan ketangguhan daerah perlu adanya antisipasi dampak bencana berupa investasi menghadapi bencana baik pada tataran siaga bencana, tanggap bencana dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Investasi menghadapi bencana sangat diperlukan guna mitigasi risiko dan meminimalisir dampak bencana. Bencana tidak mungkin kita hindari dan kerugian akibat bencana tidak bisa dikesampingkan. Namun demikian, semakin siap dalam menghadapi bencana maka risiko yang timbul bisa diminimalisir. Kesiapan menghadapi

bencana juga menjadikan proses pemulihan pasca bencana semakin cepat. Pada akhirnya ketahanan pasca bencana akan menguat.

Penguatan ketahanan Daerah merupakan cara untuk menunjukkan bahwa daerah atau negara dalam upaya penguatan masyarakat (*community building*), pengembangan wawasan kebangsaan, dan pembangunan nasional harus menasar pada aset dan modal sosial masyarakat. Aset dan modal sosial ini fokus pada penguatan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan dan adat istiadat masyarakat lokal Kalimantan Tengah. Potensi tersebut akan maksimal bila strategi dan pendekatan yang digunakan adalah *community building*.

Community building yang dimaksud adalah sebuah pendekatan dalam mengatasi masalah dan menciptakan peluang pengembangan bagi komunitas lokal dalam mengantisipasi perubahan dan ancaman perubahan global. Implementasinya adalah dengan membangun komunitas mulai level keluarga; para keluarga saling belajar untuk saling bergantung dan bekerja bersama untuk hal-hal tertentu yang dapat menciptakan kesadaran diri yang baru terkait dengan aset mereka, baik kolektif maupun individual. Dalam prosesnya, kerja bersama antar keluarga akan menciptakan modal sosial, kekeluargaan dan kemanusiaan. Modal tersebut akan menyediakan landasan baru bagi masa depan yang lebih menjanjikan. Melalui kerja bersama tersebut, para keluarga yang terikat sebagai kesatuan komunitas kemudian bisa membangun koneksi kembali (*reconnection*) dengan cita-cita (wawasan) kebangsaan untuk menghadapi persaingan dan ancaman globalisasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pokok misi 2 dirumuskan sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan, dan pusat-pusat kebudayaan beserta penguatan tokoh lintas agama sebagai penggerak peradaban dan pilar pembentuk kemajemukan;

- b. Melakukan pendampingan terhadap Komunitas Adat untuk memperoleh pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat;
- c. Memperkuat masyarakat tahan bencana melalui mitigasi dan manajemen kebencanaan termasuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak covid-19;
- d. Mempercepat pengembangan Kawasan food estate dan penguatan ekonomi kerakyatan yang mengutamakan potensi dan keunggulan lokal.

2. Misi ke 5 "Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender".

Pembinaan nilai-nilai religius atau keimanan sangat penting bagi masyarakat heterogen. Kalimantan Tengah yang heterogen tentu memiliki landasan filosofis yang kuat tentang kehidupan beragama. Nilai-nilai religius yang terkandung dalam setiap sikap dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara seharusnya menjadi perekat dalam menjalani kehidupan di tengah heterogenitas masyarakat Kalimantan Tengah yang memang dikenal memiliki keanekaragaman dalam hal suku, agama, ras serta golongan. Keanekaragaman ini patutlah menjadi kekayaan yang memberi warna bagi kehidupan masyarakat dan bukan menjadi sumber perpecahan dan konflik. Kalimantan Tengah sudah belajar banyak mengenai konflik horizontal dengan berbagai isu yang berkembang sehingga sudah saatnya untuk merancang suatu strategi dan model kehidupan masyarakat yang tenteram dan nyaman di tengah heterogenitas dan pluralisme bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila.

Oleh karena itu, pembinaan nilai luhur yang terkandung dalam agama dan budaya perlu dilakukan melalui berbagai upaya, seperti melalui proses pendidikan agama, latihan dan pembiasaan dan peneladanan. Dalam konteks sosio kultural, pendidikan merupakan proses untuk membudayakan nilai-nilai.

Selain meningkatkan peran religiusitas masyarakat dan nilai-nilai budaya lokal/prosem pembangunan Kalimantan Tengah juga memperhatikan aspek-aspek kesetaraan gender. World Bank menyebutkan bahwa kesetaraan gender merupakan komponen pokok pembangunan yang akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan secara efektif. Dalam konteks itulah jika negara kita mau membangun pemerintahan yang maju setidaknya memperhatikan masalah secara khusus yang berkaitan dengan kesetaraan gender (World Bank, 2001). Oleh sebab itu, kebijakan yang berwawasan gender sangat diperlukan, maka setiap pelaksanaan program selalu menggunakan indikator atau pertimbangan keseimbangan peran dan manfaat bagi laki-laki maupun perempuan, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dengan pendekatan ini pula setiap pelaksanaan program akan selalu menunjukkan bentuk kesetaraan, keadilan, demokratis dan transparansi yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pokok misi 5, dirumuskan sebagai berikut :

- a. Memperkuat partisipasi tokoh-tokoh lintas agama dan budaya sebagai simpul peradaban umat majemuk dan cinta damai yang berakar pada kearifan lokal falsafah Huma Betang (Rumah Besar);
- b. Mengembangkan pesantren dan institusi keagamaan lainnya sebagai garda terdepan dalam pembentukan Insan Kalteng yang beriman, pancasilais dan cinta damai;
- c. Menciptakan pemuda yang berkompeten, berakhlakul karimah, berjiwa wirausaha dan berkebudayaan, serta berwawasan gender;
- d. Memperluas partisipasi perempuan sebagai pejabat publik yang berorientasi kesetaraan gender;

Mencegah bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan serta anak dari berbagai kekerasan.

D. Perjanjian/Penetapan Kinerja

Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai target kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Daerah dengan Kepala PD dalam hal ini adalah Gubernur dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Penetapan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan :

1. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah dalam hal ini adalah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026.
2. Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan dalam hal ini adalah Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.
3. Dokumen Penganggaran dan atau Pelaksanaan Anggaran dalam hal ini adalah APBD Tahun 2024.

Tujuan disusun dan ditetapkannya Perjanjian Kinerja Aparatur dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 adalah untuk :

1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.
3. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Menilai keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi.

Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Politik	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah	Nilai / Angka	79
2	Meningkatnya Jumlah Ormas/LSM Yang Terlibat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif	Persen	90%
3.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan	orang	200
4.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Pencegahan Konflik IPOLERSOSBUD	Potensi terjadinya konflik terkait IPOLERSOSBUD yang telah ditangani (Persentase kasus yang telah ditangani)	Persen	90%
5.	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	orang	200
6.	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100%

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan perjanjian kinerja tersebut sebagaimana Tabel berikut :

**Jumlah Anggaran Program Pendukung
Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	13.149.580.519,55	
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.962.314.000	
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	10.627.889.000	
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.244.153.297	
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	6.750.638.294,23	
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.492.175.785,21	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	74 - 100%	Baik
3	55 - 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Satuan	Target Realisasi Kinerja (%)		Kategori
					Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya jumlah Masyarakat Yang Pihum Terhadap Politik	Skor III Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah	75	Item / Angka	76,47	93,33%	Baik
2	Meningkatnya jumlah Ormas/LSM Yang Terlibat Dalam Mengup Kesehatan Bangsa dan Politik	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif	90	Persen	100%	111%	Sangat Baik
3	Meningkatnya jumlah Masyarakat Yang Pihum Terhadap Kesehatan Bangsa	Masyarakat yang mengerti tentang kesehatan	200	orang	1.415 orang	707,5%	Sangat Baik
4	Meningkatnya jumlah Masyarakat Yang Pihum Terhadap Pencegahan konflik (POLERSONBUD)	Potensi terjadinya konflik terkait (POLERSONBUD) yang telah ditangani (Persentase kasus yang telah ditangani)	90	Persen	32,80%	42%	Kurang
5	Persentase Masyarakat Yang Pihum Terhadap Kesehatan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kesehatan ekonomi, sosial dan budaya	200	orang	700 orang	350%	Sangat Baik

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Satuan	Realisasi			
				2022	2023	2024	2025
Meningkatnya jumlah Masyarakat Yang Pihum Terhadap Politik	Skor III Aspek Hak-Hak Politik Provinsi	75	Item / Angka	73,17	79,3	77,57	76,47

Terdapat Politik	Kalimantan Tengah						
Meningkatnya jumlah Demas/IDM Yang Terlibat Dalam Meniaga Kualitas Sangat Ada Pengaruh	Capaian pembinaan membayar Demas, LSM dan GAT aktif	90	Persen	84,44%	117,87%	100%	117,65%
Meningkatnya jumlah Masyarakat Yang Pukun Terdapat, Kestaraan, Sangat	Masyarakat yang memiliki tentang masyarakat kebangsaan	200	orang	300 orang	1.100 orang	1.400 orang	1.415 orang
Meningkatnya jumlah Masyarakat Yang Pukun Terdapat Perwakilan Kontak (POLIKSASID)	Proses terdapat kontak terkait POLIKSASID yang telah ditangani (Pembinaan kontak yang telah ditangani)	90	Persen	63,63%	15,62%	27,94%	27,80%
Peningkatan Masyarakat Yang Pukun Terdapat Kestaraan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya	200	orang	178 orang	280 orang	600 orang	700 orang

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Rata-rata)	Target KINSTRA (Rata-rata)	Realisasi 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya jumlah Masyarakat Yang Pukun Terhadap Politik	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah	78,25	70,47	90,33%

2	Meningkatnya Jumlah Ormas/LSM Yang Terlibat Dalam Monevgo Kearsan Bangsa dan Politik	Capaian peningkatan terhadap Ormas, LSM dan GKI/ ahli	95%	100%	111%
3	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Pkham Terhadap Kemitian Bangsa	Masyarakat yang mengerti tentang monevgo kemitian bangsa	200 orang	1.815	787,5%
4	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Pkham Terhadap Pemengahan Konflik IPOLEKSOCHUD	Petani terjalanya konflik terkait IPOLEKSOCHUD yang telah dimngan (Permitase kasin yang telah dimngan)	93 %	37,00%	42%
5	Permitase Masyarakat Yang Pkham Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah masyarakat yang mendapatkan permitase dan pengaitingan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	200 orang	700 orang	350%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui media dokumen Penetapan Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pada Tahun 2025 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana telah disusun didalam Rencana Kerja Tahun 2025.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
1	2	3	4	5	6	
1.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Pkham Terhadap Politik	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah	79	76,47	96,23%	Skor IDI Kalimantan Tengah Tahun 2024 mengalami peningkatan 0,65, dibandingkan dengan skor IDI Kalimantan Tengah Tahun 2023 yang sebesar 77,57 (terjadi peningkatan sebesar 0,9 poin). Hal ini dikarenakan adanya

						peningkatan nilai dari 2 aspek penilaian yaitu dari Aspek Kebijakan meningkat 9,15 poin dari tahun sebelumnya dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokras meningkat 0,10 poin dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk Aspek Kesetaraan Menurun sebesar 5,27 Poin
2	Meningkatnya jumlah Ormas/LSM Yang Terlibat Dalam Mengisi Kelembutan Bangsa dan Politik	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif	90%	100%	111%	Selama Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan beberapa kegiatan terkait pembinaan terhadap ormas, LSM, dan OKP aktif antara lain: - Rapat Koordinasi (Rakor) Ormas sebagai Implementasi Perpendagri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Ormas Pemuda Ekuipmende dan OKP terkait - Rapat Koordinasi Aktivitas Ormas di daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - Rapat Evaluasi Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Bermusuhan, Penanganan Masyarakat, Inventasi dan Inventarisasi di Kalimantan Tengah Tahun 2025 - Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Ormas dengan tema "Forum Ormas dalam Membangun Kehidupan Sosial yang Harmonis dan Berkeadilan di Kalimantan Tengah Tahun 2025" - Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - Rapat Koordinasi Penanaman Indeks Harmoni Indonesia dan Indeks Juara Ormas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025
3	Meningkatnya jumlah Masyarakat Yang Polim. Terhadap Kelembutan Bangsa	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan	200	1.415 orang	707,5%	Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target 100 antara lain: - Rapat pembentukannya Forum Pembinaan Kelembagaan (FPK) untuk periode 2025-2026 - Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi Pemuda Pemuda Tahun 2025 dengan tema "Wawasan Kebangsaan sebagai Pondasi Ketahanan Nasional di Era Globalisasi" - Pendidikan Penguatan Penguatan Bangsa (Pukubangsa)

						Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2025. - Pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-97 dan (KIAM) Bersama Anak Bangsa (REAB) Tahun 2025. - Sosialisasi Pengantar Forum Kaltengmas (FPK) Tahun 2025 dengan tema "Forum Kaltengmas (FPK) Sebagai Garda Terdepan Menghadapi Berbagai Konflik Yang Bersifat Vertikal maupun Horizontal Diselenggarakan Oleh Berbagai Latar Belakang Permasalahan Ras, Suku, Budaya Dan Agama". - Penyelenggaraan Sekolah Wawasan Kaltengmas
4	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Tidak Terhadap Penguasaan Konflik IPOLKOSOROD	Formasi terjadinya konflik terkait IPOLKOSOROD yang telah ditangan (Perwakilan kaum yang telah ditangani)	90%	37,80%	42%	Data yang telah dikumpulkan dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 164 permasalahan yang memiliki potensi menjadi konflik dimasyarakat. 62 permasalahan telah dapat diselesaikan (37,80%) dan sedang sedang dalam proses untuk lanjut penyelesaian.
5	Pemerintah Masyarakat Yang Tidak Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100	706 orang	25,8%	Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target (KD) antara lain: - Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba Provinsi Kalimantan Tengah. - Dialog Huma Bang Bagi Generasi Muda dengan tema "Muda, Berkarya dan Bermorale, Menuju Kalimantan Tengah Menuju Masyarakat Indonesia Emas 2045". - Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba (Kotab) Provinsi Kalimantan Tengah dengan tema "Semangat Huma Bang Masyarakat Berprestasi Bersama Melawan Narkoba, Kalimantan Tengah Berkah, Kalimantan Tengah Muda, Menuju Indonesia Emas 2045". - Dialog Ketahanan Ekonomi Bagi Generasi Muda provinsi Kalimantan Tengah. - Rapat Koordinasi Penyusunan Indeks Huma Bang dan Indeks Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025. - Kegiatan Dialog Ketahanan dalam Kehidupan "Huma Bang goes to Campus" Tahun 2025.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran dan realisasi sumber daya keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Capaian Efisiensi Anggaran
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Meningkatnya jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Politik	20	20,47	99,33	10.627.889.000	10.342.020.825	97,31	[2,69]
2	Meningkatnya jumlah Ormas/LSM Yang Terlibat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	99%	100%	111	1.244.153.297	831.455.776	66,83	(33,17)
3	Meningkatnya jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Eksistensi Bangsa	200 orang	1415 orang	707,5	3.962.314.000	3.275.299.857	82,66	(17,34)
4	Meningkatnya jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Pencegahan Konflik IPOLKESOSBUD	99%	37,80%	42	1.492.175.795,21	887.150.150	59,45	(40,55)
5	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	200 orang	700 orang	350	6.750.636.294,23	6.102.140.720	90,39	(9,61)
Total					37.226.748.895,99	33.398.087.151,00	89,72	(10,28)

Dari table diatas dapat dilihat terdapat efisiensi anggaran dalam pencapaian kinerja sebesar 10,28% atau Rp3.828.661.744,99 dari total anggaran Rp37.226.748.895,99.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- a. Untuk capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah, data capaian yang ditampilkan merupakan data skor IDI Tahun 2024. Hal ini dikarenakan penilaian Skor IDI baru dilakukan setelah berakhirnya masa Tahun Anggaran yang bersangkutan. Capaian Skor IDI Tahun 2024 yang telah di *release* sebesar 79,00 dengan rincian :

- i. Aspek Kebebasan 91,16
- ii. Aspek Kesetaraan 72,39
- iii. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi 73,25

(sumber data : BPS Kalimantan Tengah)

Skor IDI Kalimantan Tengah Tahun 2024 mencapai target pencapaian yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 78,47. Skor IDI Kalimantan Tengah Tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan skor IDI Kalimantan Tengah Tahun 2023 yang sebesar 77,57 (terdapat peningkatan sebesar 0,9 poin). Hal ini dikarenakan adanya peningkatan nilai dari 2 aspek penilaian yaitu dari Aspek Kebebasan meningkat 9,15 poin dari tahun sebelumnya dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi meningkat 0,18 poin dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk Aspek Kesetaraan Menurun sebesar 5,27 Poin. Perbandingan skor aspek IDI dapat Kalimantan Tengah untuk Tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Aspek IDI	IDI Kalteng Menurut Aspek	
	2024	2023
Aspek Kebebasan	91,16	82,01
Aspek Kesetaraan	72,39	77,66
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	73,25	73,07

IDI Kalteng	78,47	77,57
-------------	-------	-------

Sedangkan apabila dibandingkan dengan IDI Pusat, IDI Provinsi Kalimantan Tengah lebih rendah 3,4 poin. Perbandingan untuk tiap aspek antara IDI Pusat dengan IDI Kalimantan Tengah sebagai berikut :

Aspek IDI	IDI TAHUN 2024	
	Pusat	Kalimantan Tengah
Aspek Kebebasan	72,66	91,16
Aspek Kesetaraan	86,44	72,39
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	85,47	73,25
IDI Kalteng	81,87	78,47
Kategori	Tinggi	Sedang

Dari tabel diatas, terlihat pada Aspek Kebebasan Provinsi Kalimantan Tengah lebih tinggi dari Pusat, namun pada Aspek Kesetaraan dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi Provinsi Kalimantan Tengah lebih rendah dari Pusat.

Terkait hal tersebut, untuk Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan beberapa kegiatan untuk menunjang capaian IKU antara lain :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Workshop Fasilitator FGD Indeks Demokrasi Indonesia melalui Zoom Meeting oleh IKPD Bappenas pada tanggal 14 Mei 2025.
Beberapa hal yang disampaikan pada kegiatan tersebut antara lain :

- Sampai dengan IDI Tahun 2020, IDI mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi di Indonesia melalui tiga aspek, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Ketiga aspek demokrasi ini kemudian dijabarkan menjadi 11 variabel, dan 28 indikator. Namun, mulai IDI 2021 metode penghitungan IDI berubah menjadi 22 indikator yang tercakup dalam 3 aspek, yaitu kebebasan (Freedom), kesetaraan (Equality), dan kapasitas lembaga demokrasi (Capacity of Institution of Democracy).
- Dalam IDI metode baru ini, selain dari dimensi politik juga dimensi ekonomi dan sosial. Dengan melihat dimensi ekonomi dan sosial, diharapkan IDI dapat menggambarkan permasalahan demokrasi, berupa ketimpangan akses dan distribusi sumber daya ekonomi dan dapat menggambarkan hambatan demokrasi yang terkait dengan kekuatan oligarki dalam sistem ekonomi dan politik, seperti monopoli dan konsentrasi sumber daya ekonomi.
- IDI metode baru tidak hanya mengukur di tingkat provinsi, namun juga di tingkat pusat. Gabungan IDI provinsi dan IDI pusat akan menggambarkan keadaan demokrasi secara menyeluruh. Indikator-indikator dalam IDI metode baru tidak hanya dari berita dan dokumen, namun juga menggunakan indeks yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga.
- Pada IDI metode baru karena semua metode pengumpulan datanya tidak memungkinkan untuk diulang, misalnya FGD pada tingkat pusat yang sebelumnya tidak ada, ada beberapa indikator yang baru dihitung pada tahun 2021, seperti Indeks Keterbukaan Informasi yang dihasilkan Komisi Informasi Pusat.

- IDI dengan metode baru menggambarkan kualitas perilaku demokrasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sehingga tinggi rendahnya IDI di suatu wilayah merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- IDI metode lama mengacu pada tingkat provinsi karena data yang dikumpulkan merupakan data di tingkat provinsi dan bukan pada tingkat nasional tetapi mulai IDI tahun 2021, IDI nasional dihitung dari nilai IDI provinsi dan pusat. Nilai IDI provinsi merupakan hasil penghitungan rata-rata dari IDI di 34 provinsi, sedangkan nilai IDI pusat merupakan hasil penghitungan indikator IDI pusat dimana dalam prosesnya, pengukuran IDI melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, DPRD, LSM, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, akademisi dan pekerja media di masing-masing provinsi dan pusat.
- Saat ini BPS sedang menghitung IDI tahun 2024 dimana tahun 2024 merupakan tahun politik dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak, sehingga menjadi penting untuk memotret kualitas demokrasi saat pergantian pemerintahan. Selain itu, IDI 2024 diperlukan untuk penyusunan evaluasi RKP 2024 dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden 17 Agustus 2024.
- Salah satu tahap penting dalam penghitungan IDI adalah FGD, baik di pusat maupun provinsi. Untuk itu, sebagai bekal Bapak/Ibu dalam melaksanakan FGD di provinsi masing-masing, kami (Pokja IDI Pusat) mengadakan Workshop Fasilitator FGD Indeks Demokrasi Indonesia.
- Secara umum FGD yang dilakukan oleh BPS Provinsi telah memenuhi standar yang diharapkan oleh BPS Pusat dan secara umum metode dan prosedur pelaksanaan FGD telah sesuai dengan ketentuan BPS Pusat.

- Lima permasalahan utama yakni Waktu Pelaksanaan FGD Molor, Materi FGD diterima pada hari H sehingga banyak peserta yang 'tidak siap'. Evaluasi peserta FGD belum optimal untuk seluruh provinsi. Masih ada peserta pasif tetapi diundang lagi. Fasilitator kurang melakukan probing serta Hasil FGD minim, hanya klarifikasi kasus saja.
- ii. Focus Group Discussion (FGD) terkait Indeks Demokrasi Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencari solusi bersama, mengintegrasikan langkah-langkah strategis untuk mendapatkan rumusan kebijakan dan langkah nyata untuk memperkuat tatanan demokrasi daerah demi terwujudnya pembangunan politik yang sehat dan berkeadilan di Kalimantan Tengah.

Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan IDI tercermin dalam visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah yang mengakat harkat dan mertabat masyarakat Dayak dan Kalimantan Tengah secara umum dalam semangat kearifan local menuju Kalteng BERKAH, Maju dan Bermartabat menyongsong Indonesi Emas 2045.

- iii. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Pengajuan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik untuk Bendahara/Pengelola Keuangan Partai Politik dapat mengelola penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik secara akuntabel, transparan, dan efisien. Maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan sosialisasi pengajuan, penggunaan, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik mengangkat tema "Wujudkan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang Akuntabel, Transparan dan Efisien". Kegiatan tersebut diselenggarakan

pada tanggal 10 November 2025 bertempat pada Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah, Jalan Brigjen Katamso No. 11, Palangka Raya. Adapun peserta pada kegiatan ini berjumlah 100 orang yang merupakan Bendahara/Pengelola/Pengurus Keuangan Partai Politik.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan penataan, penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Partai Politik, tertibnya administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Partai Politik serta tercapainya laporan keuangan Partai Politik yang tepat waktu.

- iv. Badan Keshangpol dalam hal ini terkait dengan pemahaman terkait dengan politik terutama pada generasi muda. Masih diperlukan pengelolaan pemahaman dan peranan generasi muda di dalam pendidikan politik terutama tentang tugas dan fungsi badan legislatif, khususnya peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan tugas dan fungsi legislatif sebagai wakil rakyat dapat menjaring dan memasukan harapan serta tujuan generasi muda ke dalam rencana dan kebijakan daerah, bukan hanya hasil interaksi antar eksekutif dan legislatif.

Oleh sebab itu, maka badan Keshangpol berkerjasama dengan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Legislatif Tahun 2025 dengan tema "Meningkatkan Peran Generasi Muda dalam Proses Perumusan Kebijakan Daerah" yang bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih inklusif, aspiratif, dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan perspektif dan energi kaum muda ke dalam proses pengambilan keputusan formal.

Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 19 November 2025 di tempat Ruang Rapat Serba Guna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. S. Parman No. 2, Palangka Raya. Dengan peserta berjumlah 70 orang yang berasal dari Mahasiswa (i) Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta serta dari Organisasi Kepemudaan/Organisasi Kemasyarakatan.

Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu sebagai berikut:

1. Dapat menghasilkan kebijakan yang lebih aspiratif dan relevan, khususnya anggota legislatif sebagai wakil rakyat dapat menjaring dan memasukan harapan serta tujuan generasi muda ke dalam rencana dan kebijakan daerah, bukan hanya hasil interaksi antara eksekutif dan legislatif.
2. Memperkuat kualitas Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintah, khususnya generasi muda, dalam penyusunan kebijakan mendorong proses pemerintahan yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.
3. Terlaksananya partisipasi generasi muda dalam proses kebijakan dan membuka jalan kerjasama yang lebih baik antara pemerintah daerah, organisasi non-organisasi dan sektor swasta dalam isu-isu pembangunan serta memperkuat kapasitas masyarakat khususnya generasi muda serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih adil, inklusif dan akuntabel.
- v. Dalam meningkatkan kualitas penerapan nilai-nilai demokrasi di daerah serta menyusun strategi dan langkah tindak lanjut berdasarkan hasil pengukuran IDI. Badan Kesbangpol melakukan kegiatan rapat koordinasi situasi politik dan sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah pada tanggal 27 November 2025 bertempat pada Aula Rahan Pumpung

Hapakat Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Jl. Willem AS No. 3 Palangka Raya. Dengan mengangkat tema Sinergi Pemerintah Daerah dalam Monitoring Politik dan Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025, peserta pada kegiatan ini berasal dari Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab naik atau turunnya skor IDI di tingkat Kabupaten/Kota, khususnya terkait kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Diharapkan dengan kegiatan ini bagi seluruh pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten/Kota memiliki pemahan bersama mengenai kondisi demokrasi di daerah masing-masing dan juga dapat teridentifikasinya faktor-faktor penyebab naik atau turunnya skor IDI, termasuk tantangan dan hambatan dalam penerapan nilai-nilai demokrasi, seperti pada aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi dan tercapainya kesepakatan mengenai langkah-langkah strategis dan rencana tindak lanjut konkret untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas demokrasi di masa mendatang.

- vi. Peningkatan partisipasi politik perempuan dalam membangun kehidupan berpolitik di Kalimantan Tengah serta memberikan pemahaman komprehensif tentang hak dan kewajiban politik kepada kaum perempuan di Kalimantan Tengah melalui kegiatan Pendidikan Politik Untuk Perempuan Tahun 2025 dengan Tema Perempuan Berdaya, Wujudkan Kalimantan Tengah Berkah dan Maju yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan politik dan pembangunan daerah, membangun kapasitas perempuan agar lebih mandiri dan berdaya dalam berbagai bidang termasuk ekonomi dan sosial serta

mendukung terwujudnya visi Kalimantan Tengah Berkah dan Maju.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2025 di Ruang Rapat LPP RRI Provinsi Kalimantan Tengah dengan peserta terdiri dari pengurus organisasi perempuan, pengurus partai politik, tokoh perempuan, organisasi profesi perempuan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan tercapainya yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemahaman tentang partisipasi politik perempuan dalam membangun kehidupan berpolitik di Kalimantan Tengah.
 2. Membangun pemilih perempuan yang rasional dan tidak hanya berdasarkan kedekatan sosiologis atau psikologis, tetapi memahami visi, misi, dan program kandidat atau partai politik.
 3. Memastikan perempuan memiliki peran yang proporsional dalam proses pengambilan keputusan di berbagai tingkatan pemerintah.
 4. Menciptakan perempuan Kalimantan Tengah yang berdaya, mandiri, melek politik, dan mampu berperan aktif dalam segala aspek pembangunan untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang "Berkah dan Maju".
- vii. Melalui program kegiatan Sekolah Wawasan Kebangsaan yang baru saja dirilis pada tahun ini. Dengan mengusungkan salah satunya kegiatan pendidikan politik kebangsaan untuk menjembatani partisipasi pemuda dari ranah elektoral (pemilu) ke ranah substansi kebijakan publik dan implementasi program pembangunan nasional di era pemerintahan yang baru.

Tujuan kegiatan ini untuk mendorong pemuda untuk secara aktif menuntut akuntabilitas para pejabat publik dan

wakil rakyat yang baru menjabat pada tahun 2025, memastikan kebijakan yang dihuat pro-muda dan pro-rakyat dan memastikan isu-isu yang relevan bagi generasi muda (seperti lapangan kerja, pendidikan vokasi, kesehatan mental, dan perubahan iklim) menjadi agenda prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah yang disusun pada tahun 2025 serta merumuskan dan mengusulkan mekanisme partisipasi yang efektif dan berkelanjutan bagi pemuda dan musrenbang dari tingkat desa/kelurahan hingga nasional pada tahun 2025.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2025 pelaksanaan di tempat Asrama Haji Transit Jl. G.Ohos No. 003, Palangka Raya dengan peserta berjumlah 75 orang terdiri dari Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan Organisasi Kepemudaan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini terwujudnya pemahaman yang lebih mendalam di kalangan pemuda mengenai sistem politik, hak dan kewajiban kewarganegaraan, serta kemampuan kritis dalam memilah informasi di era digital.

- b. Indikator Kinerja Utama Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif (Persen). Indikator kinerja ini dicapai melalui program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Untuk menunjang pencapaian IKU tersebut, beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :
 - i. Badan Kesbangpol Prov. Kalteng menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Ormas sebagai Implementasi Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ormas bersama Forkopimda dan OPD terkait, bertempat di Rahan Pumpung Hapakit Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan BINDA Kalteng, perwakilan Korem Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Tengah, Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya, Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah, serta perwakilan dari Kejati Kalimantan Tengah dan ASN Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah. Beberapa hal yang disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut antara lain :

- Pengawasan terhadap Ormas harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Setiap kegiatan Ormas harus sesuai dengan ketentuan yang ada, tidak bertentangan dengan hukum, dan mendukung stabilitas sosial.
- Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berbentuk pengawasan administratif, tetapi juga meliputi aspek substansi, sehingga kegiatan Ormas benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
- Selain pembinaan dan pengawasan, perlunya dilakukan penyuluhan dan edukasi kepada Ormas agar mereka memahami peran dan tanggung jawabnya dalam masyarakat. Ormas harus berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang lebih maju, adil, dan Sejahtera.

Gambar 1.1

Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Ormas



- ii. Rapat Koordinasi Aktifitas Ormas di daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh 80 orang peserta yang berasal dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, Forkopinda dan OPD Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ormas, menghimpun dan menginventarisir kendala dan permasalahan aktivitas ormas terkini di daerah, yang kemudian menjadi bahan pertimbangan, saran dan masukan dalam menentukan langkah penanganan konkrit, cegah dan deteksi dini konflik bagi stakeholder terkait aktivitas Ormas di daerah.

Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah berkaitan dengan pemetaan permasalahan dan aktivitas ormas di tingkat Kabupaten dan Kota guna memungkinkan penanganan konkrit efektif dengan stakeholder terkait.

- iii. Kegiatan Rapat Evaluasi Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah, Penanganan Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha di Kalimantan Tengah Tahun 2025. Pembentukan Satgas Terpadu merupakan instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) sebagai upaya menangani premanisme dan ormas bermasalah yang mengganggu keamanan ketertiban masyarakat, investasi dan dunia usaha.

Pembinaan dan pengawasan Ormas bukan hanya tugas satu pihak tertentu, tetapi tugas Bersama semua komponen terkait, terutama melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu, yang bekerja sama, bersinergi, dan saling membantu. Hal ini sejalan dengan Falsafah Huma Betang dimana masyarakat hidup rukun, berdampingan satu sama

lain, toleran, bahu membahu membangun Kalimantan Tengah. Pelaksanaan rapat dimaksudkan untuk menyatukan langkah dalam merumuskan program, kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan Kota/Kabupaten, terkait pembinaan dan pengawasan Ormas, dengan strategi yang lebih tajam dan terukur. Penanganan premanisme dan ormas bermasalah tidak hanya bersigat penindakan dan represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif (pencegahan). Anggota tim satgas terdiri dari unsur kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemerintah Daerah.

- (v). Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Ormas dengan tema "Peran Ormas dalam Membangun Kehidupan Sosial yang Harmonis dan Berkebudayaan Huma Betang Menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju". Kegiatan ini diikuti oleh Himpunan Mahasiswa Provinsi Kalimantan Tengah, BEM Provinsi Kalimantan Tengah, Ikatan Pelajar Mahasiswa Provinsi Kalimantan Tengah, dan Senat Mahasiswa Provinsi Kalimantan Tengah.

Maksud dan Tujuan Kegiatan :

Membangun sinergi, kolaborasi dan silaturahmi yang baik antara Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah bersama dengan Organisasi Kemasyarakatan, sesuai dengan falsafah kehidupan Masyarakat Kalimantan dengan "Huma Betang" dalam membangun kehidupan sosial kemasyarakatan yang Damai dan Harmonis.

- Salah satu upaya dalam membangun dan memperkuat kembali peran Ormas dalam rangka mendukung Pembangunan daerah serta persatuan dan kesatuan bangsa.
- Memberikan ruang atau wadah dialog Pembinaan dan penguatan kelembagaan Ormas guna menghimpun saran

masukin Organisasi Kemasyarakatan sebagai Mitra Pemerintah, yang dekat dengan kehidupan sosial kemasyarakatan serta seluruh komponen masyarakat yang secara toleran dan bahu membahu membangun wilayah Kalimantan Tengah Berkah, Bermartabat dan Maju.

Gambar 1.2
Documentasi Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Ormas



v. Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Pembinaan dan penguatan kelembagaan organisasi masyarakat (ormas) merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan peran strategis ormas dalam pembangunan nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan ormas dapat berfungsi secara efektif sebagai wadah aspirasi, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan (1) untuk memperkuat kapasitas dan kualitas kelembagaan ormas yang saat secara internal maupun eksternal; organisasi, sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan peran dan aktivitasnya secara akuntabel, demokratis, partisipatif, profesional, mandiri dan transparan sehingga dapat memberikan manfaat

nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah; (2) untuk membangun sinergi, kerjasama dan kolaborasi yang baik antara unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama dengan organisasi kemasyarakatan didalam kapasitas dan perannya masing-masing, untuk menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, membangun kehidupan sosial kemasyarakatan yang damai dan harmonis, yang akan mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan mempercepat pembangunan di Kalimantan Tengah.

Peserta dari kegiatan ini berjumlah 100 orang yang terdiri dari ketua dan pengurus organisasi kemasyarakatan/agama/kepemudaan/adat/paguyuban tingkat provinsi Kalimantan Tengah.

Beberapa kesimpulan dari kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- Pentingnya peran Ormas dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Tengah, yang merupakan faktor krusial dalam menarik investasi dan mendorong pembangunan daerah. Polda Kalteng berupaya merangkul Ormas melalui pendekatan "cooling system" sambil tetap menegakkan hukum terhadap Ormas yang melakukan pelanggaran Kolaborasi yang konstruktif antara pemerintah, kepolisian, dan Ormas diharapkan dapat menciptakan iklim sosial yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan.
- Mengenai organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia yang berjumlah 627.629 per September 2025, memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang stabil dan harmonis, beroperasi di bawah landasan hukum yang jelas, namun

menghadapi tantangan seperti gangguan keamanan yang dapat mempengaruhi investasi. Strategi pemberdayaan melalui pendidikan, pelatihan, dan keterlibatan dalam kegiatan pemerintah sangat diperlukan untuk meningkatkan peran ormas serta untuk mendukung stabilitas daerah dan mencegah konflik sosial. Dengan dukungan yang tepat, ormas dapat berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, berkontribusi pada pembangunan sosial dan perdamaian.

- Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia, menyoroti dasar hukum yang mengatur pendaftaran dan pengesahan badan hukum, serta manfaat yang diperoleh Ormas berbadan hukum, seperti perlindungan dan kepastian hukum, penghindaran sengketa, dan kemudahan dalam pengurusan perizinan. Proses pengesahan badan hukum dilakukan secara elektronik melalui Sistem Layanan Badan Hukum (SABH) oleh Kementerian Hukum, dengan biaya tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah terbaru.

Gambar 1.3

Bullaymentu Kegiatan Pendidikan dan Penguatan Kelembagaan Organisasi Komunitas Perdes Kalimantan Tengah Tahun 2023



- vi. Upaya kolaboratif dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Ormas sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua pihak. Untuk menciptakan hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas mengadakan Kegiatan "Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025". Upaya ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yang diselenggarakan pada tanggal 17 September 2025 bertempat di Aula Eka Hapakat Lantai 3 Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jl RTA Milono No. 1, Palangka Raya. Peserta berasal dari 50 organisasi kemasyarakatan Tingkat Provinsi yang memiliki legalitas dari Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Hukum RI.

Diharapkan melalui kegiatan ini dapat terjalin sinergitas, koordinasi dan kerjasama terpadu terhadap pembinaan dan pengawasan aktivitas ormas dalam rangka menjaga stabilitas sosial, politik, hukum, keamanan dan ketertiban umum di daerah.

- vii. Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Indeks Harmoni Indonesia dan Indeks Kinerja Ormas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melalui bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama Dan Ormas Dengan Tema "Sinergitas Dan Koordinasi Pemerintah Daerah Mewujudkan Stabilitas Dan Memperkuat Ketahanan Daerah Untuk Pembangunan Kalimantan Tengah Yang Berkelanjutan Berkah Dan Maju, Menuju Indonesia Emas 2045" yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2025

bertempat di Aula Rahan Pumpung Hapakat, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya. Peserta berasal dari Badan Kesbangpol dan Bappeda Kabupaten / Kota se-Kalimantan Tengah dengan jumlah peserta 100 orang.

Tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka sinergitas, koordinasi serta menyamakan persepsi dan pelaksanaan teknis mengenai Indikator Kinerja Umum Badan Kesbangpol diperlukan Rapat Koordinasi Penyusunan Indeks Harmoni Indonesia dan Indeks Kinerja Ormas di Provinsi Kalimantan Tengah. Harapannya melalui kegiatan ini sebagai terwujudnya sinergitas, koordinasi serta mempunyai standar dan persepsi yang sama dalam memberikan pelayanan publik mengenai pembinaan dan pengawasaan organisasi kemasyarakatan dalam menyikapi permasalahan sosial kemasyarakatan, maupun menyusun indeks kinerja ormas dalam menilai efektivitas, kepatuhan serta kontribusi ormas terhadap pembangunan.

- c. Indikator Kinerja Utama (IKU) Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan (orang). IKU tersebut diterjemahkan pelaksanaannya melalui program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Untuk menunjang pencapaian IKU tersebut, beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

- i. Rapat pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) untuk periode 2025-2026. Beberapa hal yang dibahas dalam kegiatan tersebut seperti :
 - Pentingnya keberadaan FPK sebagai wadah yang dapat menjembatani dan memperkuat semangat kebangsaan, serta membangun kohesi sosial di tengah keberagaman etnis dan budaya masyarakat Kalimantan Tengah yang

dapat menjadi motor penggerak aksi nyata di tengah masyarakat;

- Efisiensi dalam penyusunan program kerja FPK, mengingat kondisi fiskal pemerintah provinsi yang sedang melakukan penghematan anggaran, menekankan bahwa efektivitas kegiatan harus tetap terjaga dengan mengedepankan sinergi dan inovasi;
- Usulan program kerja yang meliputi konsolidasi internal, sosialisasi pembauran kebangsaan, serta pendataan anggota paguyuban di seluruh wilayah Kalimantan Tengah;
- Usulan agar FPK dapat menempati gedung sekretariat tetap yang berasal dari aset milik pemerintah provinsi yang tidak terpakai, guna menunjang kelancaran kegiatan organisasi;
- Selain itu, gagasan pembentukan Bidang Internal serta Koordinator Wilayah (Korwil) FPK di setiap kabupaten/kota juga mengemuka sebagai langkah strategis memperluas jaringan pembauran kebangsaan.

Gambar 1.4
Dokumentasi Kegiatan Rapat Pembentukan FPK



- ii. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi Tenaga Pendidik Tahun 2025 dengan tema **"Wawasan Kebangsaan sebagai Pondasi Ketahanan Nasional di Era Globalisasi"**.

Kegiatan ini diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang merupakan guru pengampu Pendidikan Pancasila pada SMA/SMK/Sederajat yang ada di Kota Palangka Raya yang dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- Meningkatkan kesadaran segenap komponen bangsa untuk menerima, menghormati dan menghargai segala bentuk keragaman;
- Mengoptimalkan pembelajaran Wawasan Kebangsaan yang sejalan dengan proses reformasi dan tidak induktisasi;
- Meningkatkan keteladanan dari para pimpinan nasional.

Wawasan kebangsaan bagi tenaga pendidik melibatkan pengembangan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai, sejarah, budaya, dan identitas nasional, serta komitmen untuk mendidik siswa dalam semangat cinta tanah air, keberagaman, dan keterbukaan. Hal ini penting agar tenaga pendidik mampu membentuk generasi yang memiliki kesadaran akan pentingnya persatuan, keadilan, dan keberagaman dalam membangun negara.

Gambar 1.5
Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi PPWK bagi Tenaga Pendidik Tahun 2025



- iii. Kegiatan pendidikan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2025 telah selesai dilaksanakan. Berikut adalah rangkuman kegiatannya:

Tahap seleksi

- **Waktu:** Dibuka pada 5 Mei 2025.
- **Penutupan seleksi:** Berakhir pada 9 Mei 2025.
- **Pelaksanaan:** Seleksi dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalteng.
- **Peserta:** Dilikuti oleh perwakilan siswa dari 14 kabupaten/kota se-Kalteng sebanyak 80 orang peserta.
- **Fokus penilaian:** Seleksi dilakukan secara objektif dan transparan, berdasarkan pada integritas, kualitas, kapasitas, dan kapabilitas calon anggota.

Tahap pemusatan pendidikan dan pelatihan (pusdiklat)

- **Pembukaan:** Dimulai dengan Upacara Tantikan pada 4 Agustus 2025.
- **Peserta:** Dilikuti oleh 54 pelajar terbaik yang lolos dari tahap seleksi.
- **Pendekatan holistik:** Program pusdiklat mengusung pendekatan unik dan holistik dengan konsep "Desa Bahagia" untuk membentuk karakter yang tangguh.

Konsep "Desa Bahagia" adalah konsep asrama dan tempat pemusatan latihan untuk Paskibraka, bukan nama desa sebenarnya, yang dirancang untuk membentuk karakter dan kedisiplinan para calon anggota Paskibraka. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan "miniatur Indonesia yang damai dan harmonis" di mana peserta dilatih untuk menjadi pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.

Berikut adalah beberapa hal yang lebih mendetail tentang Desa Bahagia:

- **Tujuan pelatihan:** Melatih calon Paskibraka tidak hanya menjadi pengibar bendera yang terampil, tetapi juga membentuk karakter, menanamkan jiwa kepemimpinan, kedisiplinan, dan patriotisme.
- **Pembentukan karakter:** Calon Paskibraka diminta untuk memahami dan menyetujui aturan-aturan "Desa Bahagia" yang menekankan pada nilai-nilai Pancasila dan semangat gotong royong.
- **Proses "masuk" Desa Bahagia:** Sebelum benar-benar masuk, calon Paskibraka akan melalui sebuah "tantingan" atau proses seleksi.
- **Simbolisme:** "Desa Bahagia" adalah simbol dari Indonesia yang makmur, damai, dan sejahtera, di mana peserta juga diajak untuk membangun kekompakan dan rasa kekeluargaan seperti dalam satu keluarga besar.
- **Kegiatan:**
 - Latihan fisik, seperti senam bersama Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia (IOSKI).
 - Sesi konseling bersama psikolog untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani.
 - Materi-materi tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan.
- **Penguhan:** Anggota Paskibraka Kalteng 2025 dikukuhkan oleh Gubernur pada 15 Agustus 2025.

Puncak acara

- **Tugas utama:** Mengibarkan bendera Merah Putih dalam upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat provinsi.

Gambar 1.6
Dokumentasi Kegiatan Pengjurusan Paskibraka
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025



- iv. Event tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkerjasama dengan Kabupaten Sukamara sebagai Tuan Rumah Pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-97 dan IKRAR Bersama Anak Bangsa (IKBAB) Tahun 2025. Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 25-28 Oktober 2025 dan peserta berjumlah 840 orang dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Hari Sabtu, 25 Oktober 2025

Melaksanakan kegiatan Technical Meeting mengenai penjelasan pelaksanaan lomba, antara lain terkait dengan lomba Cerdas Harati Pancasila, Tata Upacara Bendera (LTUB), Sepakbola Sarung, dan Lomba Kasti.

2. Hari Minggu, 26 Oktober 2025

Melaksanakan kegiatan perlombaan yang diantaranya adalah :

- a) Lomba Cerdas Harati Pancasila, yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan bagi pemuda guna memperdayaan dan penguatan kesadaran

berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila.

- b) Tata Upacara Bendera (LTUB), bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, membiasakan bersikap tertib dan disiplin, meningkatkan kemampuan memimpin, membiasakan kekompakan dan kerjasama, menumbuhkan rasa tanggungjawab, dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air.
- c) Lomba Bola Kasti Khusus Putri, pada cabang olahraga ini dipilih karena merupakan olahraga tradisional yang sangat sarat dengan nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kedisiplinan, dan ketangkasan melalui lomba ini juga diharapkan para peserta dapat menyalurkan minat dan bakat, mempererat persaudaraan antar pelajar, mengembangkan keterampilan serta ketangkasan dan kerja sama tim dalam olahraga tradisional.
- d) Sepakbola Sarung, diselenggarakannya lomba ini untuk meningkatkan kebersamaan, sportivitas dan kekompakan antar pelajar se-Kalimantan Tengah. Lomba ini tidak hanya hiburan, tetapi juga melatih kekompakan, strategi, serta menambah keceriaan dalam suasana kebersamaan Hari Sumpah Pemuda Ke-97 dan Ikrar Bersama Anak Kebangsaan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Hari Senin, 27 Oktober 2025

Melaksanakan penanaman mangrove di Pantai Lunci melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang

bertujuan memberikan pengetahuan bagi para pemuda se-Kalimantan Tengah untuk melindungi garis pantai dari abrasi dan dampak perubahan iklim, menjaga keanekaragaman hayati, dan mendukung kehidupan masyarakat pesisir. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan pada malam hari yaitu acara Malam Pencerahan Kehangsaan yang berguna untuk memberikan motivasi dengan pemuda dengan tema "Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu" yang mengandung pesan bahwa kejayaan Indonesia di masa depan harus diwujudkan melalui kolaborasi lintas elemen bangsa.

4. Hari Selasa, 28 Oktober 2025

Pada tanggal 28 Oktober 2025 ini melaksanakan kegiatan upacara bendera peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025.

Adapun hasil yang dicapai dari pelaksanaan rangkaian kegiatan Hari Sumpah Pemuda, disandingkan dengan kaitannya terhadap pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan(WK) dimana baik latar historisnya maupun implementasinya di era modern, merupakan inti dari penguatan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

- v. Pelaksanaan Sosialisasi Penguatan Forum Kebangsaan (FPK) Tahun 2025 dengan tema "Forum Kebangsaan (FPK) Sebagai Garda Terdepan Menghadapi Berbagai Konflik Yang Bersifat Vertikal Maupun Horisontal Disebabkan Oleh Berbagai Latar Belakang Permasalahan Ras, Suku, Budaya Dan Agama". Sekaligus "Penguatan Pengurus FPK Prov. Kalteng Priode Tahun 2025-2027. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 November 2025 di Aula Jayang Tingang (AJT) Lt. II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jl. RTA Milono No. 01 Palangka Raya dengan peserta berjumlah 300 orang dari berbagai unsur pemerintah,

organisasi masyarakat, paguyuban, dan FPK se-Kalimantan Tengah.

Pelaksanaan kegiatan ini maksuda sebagai wadah pembinaan dan penguatan semangat persatuan dalam keberagaman, serta meningkatkan nilai-nilai kebangsaan di daerah serta dengan tujuan agar meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan kesetaraan antarwarga. Selain itu juga guna memperkuat komunikasi lintas etnis, budaya, dan agama untuk mencegah potensi konflik sosial dan serta mendorong partisipasi aktif anggota FPK dalam merumuskan dan melaksanakan kegiatan pembauran di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat mencapai hasil yang mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya peran FPK sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta memperkuat integrasi sosial di tengah keberagaman.

- vi. Penyelenggaraan Sekolah Wawasan Kebangsaan merupakan inovasi baru hadir ditahun 2025 ini dengan maksud sebagai wadah untuk para generasi muda untuk tempat memberikan pedoman dan arah penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan tentang penguatan wawasan kebangsaan. Sehingga tujuan kegiatan agar meningkatnya pemahaman peserta mengenai nilai dasar Pancasila, UUD NKRI Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai fondasi wawasan kebangsaan serta mengembangkan kemampuan peserta dalam mengenali dan menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan

(ATHG) terhadap keutuhan bangsa dan stabilitas daerah. Kegiatan berlangsung dari tanggal 1 sd 5 Desember 2025 di Asrama Haji Transit Palangka Raya, Jl. G. Obos, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan peserta berjumlah 75 orang yang merupakan dari berbagai Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan Organisasi Kepemudaan. Sehingga hasil dicapai yaitu antara lain:

- a) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai nilai-nilai dasar Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, serta falsafah Huma Betang dan Belom Bahadat yang menjadi identitas kultur masyarakat Kalimantan Tengah.
- b) Meningkatnya kesadaran peserta terhadap ancaman ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme, melalui mater yang disampaikan oleh Densus 88, Psikolog, dan narasumber lainnya yang relevan dengan dinamika keamanan nasional dan daerah.
- c) Meningkatnya kemampuan peserta dalam mendeteksi dini dan melakukan cegah dini terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang dapat mengancam stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat.
- d) Terbangunnya pemahaman peserta mengenai peran strategis pemuda dalam kehidupan politik nasional, termasuk kontribusi pemuda dalam menciptakan sistem politik yang sehat, etis, dan berintegritas.

- d. Indikator kinerja utama Potensi Terjadinya Konflik Terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentasi Kasus yang telah Ditangani). Indikator kinerja ini dicapai melalui program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan

Facilitasi Penanganan Konflik Sosial. Untuk menunjang pencapaian IKU tersebut, beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

- i. Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika sosial politik yang berkembang di Kalimantan Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di ruang Rahan Pumpung Hapakat, Kantor Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, pada Rabu (30/4/2025). Rapat yang dipimpin oleh Kepala Badan, Katma F. Dirua, ini melibatkan unsur TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, OPD Provinsi Kalimantan Tengah, dan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Kalteng melalui *zoom meeting*.

Agenda utama rapat selain membahas kesiapan menjelang Hari Buruh Internasional (*May Day*), juga menyoroti berbagai isu strategis yang berpotensi memicu konflik sosial di daerah. Diantaranya adalah sengketa lahan adat, dugaan pelanggaran HAM dalam skema plasma sawit, ketimpangan pelaksanaan CSR perusahaan, serta meningkatnya jumlah organisasi kemasyarakatan yang berpotensi tumpang tindih fungsi dan memicu keresahan sosial.

Gambar 1.7
Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah



- ii. Rapat Kewaspadaan Dini Daerah terhadap Situasi Terkini di Kalimantan Tengah.

Kegiatan rapat ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan pemetaan isu-isu strategis yang berkembang di daerah dan dilaksanakan secara *hybrid* dan diikuti secara daring oleh para peserta dari seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Peserta rapat terdiri dari unsur Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik (Pengkumpul) Darhlansjah, jajaran Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota, Perwira Seksi Intel Kodim, serta Kasi Intel Polres se-Kalimantan Tengah. Forum ini menjadi ajang strategis untuk menyampaikan kondisi terkini dan langkah antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan di wilayah masing-masing.

Selain itu, rapat juga menjadi ruang berbagi informasi dan evaluasi atas upaya-upaya kewaspadaan yang telah dilakukan oleh masing-masing daerah. Sejumlah daerah melaporkan dinamika masyarakat terkait isu lingkungan,

penyebaran berita bohong, hingga potensi kerawanan lain yang perlu diantisipasi bersama.

Gambar 1.0
Dokumentasi Kewaspadaan Dini



iii. Rapat Fasilitasi Penanganan Konflik Pemerintahan Dalam Rangka Pembahasan Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN).

Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) adalah salah satu indikator kinerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan umum Kementerian Dalam Negeri. Maksud pengukuran IKN adalah :

- Menyediakan alat ukur yang objektif dan sistematis;
- Mengidentifikasi secara dini potensi ancaman dan gejala konflik;
- Mendukung pengambilan kebijakan pemerintah berbasis data;
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah;
- Mengintegrasikan sistem kewaspadaan nasional ke dalam dokumen RPJMD, Renstra, dan sebagainya.

Tujuan Pengukuran IKN untuk memahami, memantau, dan meningkatkan kewaspadaan di berbagai wilayah Indonesia.

Beberapa hal yang disampaikan antara lain :

- Indeks merupakan ukuran statistik perubahan dalam kelompok representatif dan titik data individual, yang didapatkan dari jumlah sumbu seperti kinerja organisasi, harga, produktivitas dan karyawan/pekerja. Indeks dibuat dengan metode berbeda - beda dari yang sederhana sampai yang kompleks. Indeks berkaitan dengan angka yang merupakan suatu angka yang berguna untuk mengukur dan menyatakan perubahan yang relatif
- Indeks Kewaspadaan Nasional merupakan Alat Ular kewaspadaan Nasional yakni suatu kualitas dan kuantitas terhadap kesiap siagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI.
- Dalam Menyusun Indeks sangat penting memiliki kejelasan tentang siapa yang mengukur, bagaimana metode pengukuran dan ketersediaan pembiayaan/anggaran.
- IKN memiliki 4 aspek yaitu Sosial, Politik, Hukum dan Ekonomi.

iv. Rapat Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing di Daerah.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan stabilitas politik dalam negeri. Keutuhan negara yang sangat luas tentu saja membawa berbagai potensi ancaman. Keberadaan orang

asing di Indonesia perlu diwaspadai guna mendeteksi dan mengantisipasi potensi ancaman terhadap integritas wilayah, ideologi, dan stabilitas politik negara. Oleh karena itu, pengawasan terhadap orang asing menjadi komponen strategis, karena keterlibatan orang asing dapat menimbulkan ancaman potensial, seperti: penyusupan ideologi radikal, terorisme, spionase terhadap strategi negara, penyalahgunaan izin tinggal untuk kegiatan ilegal, dominasi ekonomi asing yang dapat melemahkan ekonomi lokal, penyebaran informasi palsu, serta kejahatan lintas negara (perdagangan orang dan radikalisasi).

Tujuan dari kegiatan pemantauan orang asing adalah untuk menjaga kedaulatan negara, mendeteksi potensi ancaman, melindungi kepentingan pembangunan nasional, serta membangun sinergi antar instansi terkait. Meningkatkan intensitas pemantauan terhadap orang asing sangat penting untuk memperkuat integritas nasional.

Beberapa hal yang disampaikan pada saat pertemuan antara lain :

- Pembentukan "Sistem perizinan terpadu riset di Indonesia" yaitu sebuah portal digital nasional lintas sektor yang berfungsi sebagai clearing house, sehingga peneliti asing hanya mengajukan satu permohonan terintegrasi untuk semua jenis izin yang dibutuhkan.
- Pengawasan Penggunaan TKA dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian Ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

- Pengawasan orang asing harus diperketat, mengingat mudahnya persyaratan untuk mendapatkan perizinan oleh orang asing.
- Direktorat Keamanan Diplomatik Kementerian Luar Negeri menjalankan tugas sebagai Koordinator Tim Perizinan Ormas Asing (TPOA), sehingga yang diawasi adalah ORMAS Asing, bukan perorangan asing.
- Tantangan pengawasan ormas asing di Indonesia, yang paling penting yaitu politis. Perlu adanya sensitivitas kewaspadaan, karna ada beberapa ormas asing yang memiliki kepentingan politik tertentu.
- Penguatan sinergi antara Baintelkam, BIN dan BAIS TNI untuk early warning system terhadap ancaman non-militer dari WNA.
- Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan dan pengawasan orang asing di daerah dilaksanakan oleh Badan KESBANGPOL, sebagai atensi tersendiri untuk penguatan deteksi dini atas stabilitas keamanan di daerah.

Gambar 1.8
Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing di Daerah



V. Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme bagi ASN Provinsi Kalimantan Tengah

Maksud Pelaksanaan adalah Melaksanakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan tujuan sosialisasi ini diharapkan para ASN Prov. Kalteng dapat memahami dan meningkatkan kewaspadaan terhadap sikap dan tindakan ekstremisme yang mengarah pada terorisme di lingkungan kerja dan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang damai dengan spirit *belom bahadat dan berdaya saing intuk Kalteng Maju dan Kalteng Bermartabat*. Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang peserta yang merupakan ASN dari perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sosialisasi ini merupakan bentuk kegiatan edukatif kepada ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, agar memperkuat peran sebagai garda depan dalam menjaga Ideologi Pancasila dan Keutuhan NKRI.

Gambar 1.10

Documentasi Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme bagi ASN Provinsi Kalimantan Tengah



- vi. Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Bagi ASN Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan yang diikuti oleh 100 orang peserta yang berasal dari perwakilan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini diadakan dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN-PE), dengan tujuan menambah pemahaman dan wawasan ASN pada perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap paham dan aksi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dini di lingkungan kerja dan di lingkungan masyarakat.

Beberapa materi yang disampaikan pada kegiatan ini antara lain :

- Kepala Satuan Tugas Wilayah Kalimantan Tengah Densus 88 Anti Terror disampaikan oleh Bapak Ipda Ganjar Satriyono, S. Sos, dengan penyampaian materi "Karakteristik Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah pada Terorisme di Lingkup Kerja dan Masyarakat".
- Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Kalimantan Tengah disampaikan oleh Bapak Prof. Dr. H. Khairil Anwar, dengan Materi "Upaya Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Lingkungan Kerja dan Masyarakat".
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah disampaikan oleh Bapak M. Katma F. Dirun, SE, M.A.P, dengan Materi "Aktualisasi

Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nilai Pancasila Dalam Pencegahan Ekstrimisme".

- Widyaiswara Ahli Madya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Stepanus, S. Hut, M.P, dengan Materi "Implementasi Falsafah Huma Betang dan Belom Bahadat sebagai Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Lingkungan Kerja dan Masyarakat".

vii. Rapat Koordinasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik se Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, serta menindaklanjuti Surat Edaran dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor 300/e-7/Polpum tanggal 30 Juni 2025 Perihal Antisipasi Dampak Dinamika Global (Iran vs Israel). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan, mengoordinasikan, dan melaporkan Kegiatan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah merasa perlu untuk menyiapkan Langkah Strategis Daerah dalam menghadapi dinamika kondisi keamanan Global terhadap Stabilitas Nasional khususnya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah.

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik se Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 diselenggarakan untuk menghimpun dan

menganalisis isu – isu faktual terkait permasalahan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang terjadi di seluruh Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah serta menjadi sarana untuk mencari Solusi atas isu – isu faktual yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah.

Peserta yang hadir pada Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik se Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 adalah sebanyak 70 (tujuh puluh) orang terdiri atas :

- Kepala Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah;
- Kepala Bidang dan JFT pada Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah.

Beberapa materi yang disampaikan pada kegiatan ini antara lain :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah disampaikan oleh Bapak Dr. M. Katma F. Dirun, SE, MM, dengan penyampaian materi "Peran Strategi Bidang Wasnas dalam Deteksi dan Cegah Dini".
- Direktur Intelkam POLDA Kalimantan Tengah disampaikan oleh Bapak Ardiansyah, M. Si, dengan Materi "Potensi Ancaman dan Gangguan Ketertiban di Wilayah Kalimantan Tengah dalam menjaga Stabilitas Keamanan Nasional".
- Kepala Bagian Operasional BINDA Kalimantan Tengah diwakili oleh Bapak Firmansyah, SE, MAP, dengan Materi "Deteksi Dini Potensi Konflik Sosial dalam Upaya Cipta Kondisi yang Kondusif di Daerah".

viii. Dalam rangka memperkuat ketahanan dan kewaspadaan nasional di daerah dalam hal ini berkaitan dengan

Pengukuran Indeks kewaspadaan Nasional (IKN) difasilitasi Oleh KEMENDAGRI melalui Direktorat Kewaspadaan Nasional Direktorat Jendral Politik dan Pemerintah Umum, maka Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Sosialisasi Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang dilaksanakan Pada tanggal 17 November 2025 bertempat pada Aula Rahan Pumpung Hapakat, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya. Dengan peserta berjumlah sebanyak 70 orang yang berasal dari Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, serta staff Bidang Kewaspadaan dan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini tentunya seluruh Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dapat berperan aktif untuk menyukseskan pengukuran terkait indeks kewaspadaan Nasional ini. Mengingat kebutuhan responden yang mencapai sekitar 1.250 orang dari seluruh Provinsi Kalimantan Tengah, oleh sebab itu maka setiap Kabupaten/Kota ditargetkan sebanyak 90 responden guna tercapainya kebutuhan responden dan memastikan hasil dari Pengukuran IKN di Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya menjadi Indikator Statis. Namun juga sebagai alat navigasi kebijakan untuk menjaga stabilitas dan harmoni di Kalimantan Tengah.

Diharapkan dari kegiatan ini sosialisasi ini mendorong Pemerintah Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah untuk segera menyiapkan pelaksanaan

Pengukuran IKN Kabupaten/Kota Tahun 2026 sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- ix. Dalam meningkatkan pemahaman mengenai tugas dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), menghimpun isu-isu aktual yang berkembang di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, serta menjadi wadah informasi dan pengalaman dalam rangka mendukung pemerintah daerah menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman Masyarakat. Maka diselenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Se-Kalimantan Tengah Tahun 2025. Peserta sebanyak 70 orang terdiri dari Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, JFT Bidang WASNAS Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, Ketua/Wakil/Sekretaris dan Anggota FKDM Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dan Anggota Puskomin Provi. Kalimantan Tengah.

Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 18 November 2025 bertempat pada Aula Rahan Pumpung Hapakat, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, Palangita Raya. Melalui kegiatan ini diharapkan FKDM Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dapat meningkatkan perannya sebagai jembatan komunikasi antar Pemerintah Daerah dan Masyarakat guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan sejak dini serta meminimalisir konflik sosial gangguan keamanan sejak dini serta meminimalisir konflik sosial secara efektif.

- x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melakukan Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang

mengarah pada Terorisme Bagi Pelajar SMA/SMK di Kota Palangaka Raya Tahun 2025 yang berkolaborasi dengan Satgas Wil. Densus 88 AT POLRI. Dengan peserta berjumlah 150 orang yang berasal dari pelajar SMA/SMK di Kota Palangaka Raya Tahun 2025. Pada tanggal 19 November 2025 di Aula Eka Hapakat Lantai III Kantor Gubernur Palangaka Raya.

Melalui kegiatan ini diharapkan menambah pemahaman dan wawasan pelajar SMA/SMK di Kota Palangaka Raya terharap paham dan aksi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, sehingga meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dini di lingkungan sekolah dan lingkungan Masyarakat.

- e. IKU Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (orang). Indikator kinerja ini dicapai melalui program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba Provinsi Kalimantan Tengah

Kegiatan ini diikuti oleh Walikota, Bupati, TP PKK se Kalteng, BEM/HIMA/SENAT , Organisasi Kepemudaan yang bergerak di Bidang Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dengan tujuan untuk sinergitas, koordinasi dan kerjasama yang Responsif, Komprehensif dan Integratif antara Pemerintah Daerah bersama dengan elemen/lapisan Masyarakat dimulai dari Penguatan Ketahanan Keluarga dan Penguatan Ketahanan Masyarakat, agar Pemerintah Daerah Tanggap Terhadap Ancaman Penyalahgunaan Narkotika.

Kesimpulan / Hasil Pelaksanaan Kegiatan :

- Adanya Langkah Konkrit atau Langkah nyata kebijakan berbagai sektor pembangunan di Wilayah Kabupaten/Kota yang berorientasi pada pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba
- Dalam korangka mempersiapkan dan menuju Indonesia Emas 2045, perlu dilakukan edukasi secara massif dan berulang-ulang kepada Generasi Muda khususnya Usia Dini, mengenai Bahaya Narkotika di Prov Kalteng, hanya ada 6 Kabupaten yang telah membuat perda Narkoba sbgi Langkah penguatan regulasi, sehingga mendorong untuk Kab/Kota yang belum membuat perda narkoba untuk segera menindaklanjuti
- Membentuk Tim terpadu P4GN, yg merupakan gabungan dari forkoplinda, instansi vertikal dan OPD terkait, agar setiap komponen / stakeholder dapat melakukan Pencegahan ataupun pemberantasan Narkotika sesuai dengan Tusi nya masing-masing
- Bahwa keterlibatan semua stakeholder baik Pemerintah Daerah, ormas, TP PKK untuk dapat membuat rencana aksi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, dimana Rencana Aksi tersebut, agar dapat diimplementasikan sehingga tidak hanya sekedar rencana tapi menjadi aksi nyata.
- Sinergitas dan kerjasama yang Responsif, Komprehensif dan Integratif antara Pemerintah Daerah bersama dengan elemen/lapisan Masyarakat dimulai dari Penguatan Ketahanan Keluarga dan Penguatan Ketahanan Masyarakat, agar Pemerintah Daerah Tanggap Terhadap Ancaman Penyalahgunaan Narkotika

- ii. Kegiatan Dialog Huma Betang Bagi Generasi Muda dengan tema "Muda, Berkarya dan Berinovasi, Menuju Kalimantan Tengah Maju untuk Menyambut Indonesia Emas 2045". Kegiatan ini merupakan implementasi dan konsistensi penerapan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemherantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Tujuan pelaksanaan yang diikuti oleh guru dan siswa/siswi perwakilan SMA dan SMK baik negeri maupun swasta di Palangka Raya adalah untuk memberikan pengetahuan tentang paham radikalisme, terorisme, bahaya narkotika dan bahaya judi online, pinjaman online, pencegahan dan penanganan pornografi bagi generasi muda; upaya mewujudkan Indonesia dan Kalimantan Tengah yang bersih dari penyalahgunaan narkotika serta sebagai salah satu langkah preventif menyikapi situasi terkini mengenai peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika dan precursor narkotika di kalangan generasi muda.

Kegiatan ini selaras dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah terpilih, yaitu untuk membentuk generasi muda "generasi itah" sebagai tongkat estafet pembangunan Kalimantan Tengah yang memiliki semangat kebangsaan, menjiwai spirit "Belom Bahadat" dan berdaya saing untuk Kalimantan Tengah Berkah, Kalimantan Tengah Maju, Kalimantan Tengah Bermartabat dalam menyambut Indonesia Emas 2045.

Maksud dan Tujuan Kegiatan :

- Sebagai implementasi dan konsistensi penerapan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

- Memberikan pengetahuan tentang paham radikalisme, terorisme, bahaya Narkotika dan bahaya judi online, pinjaman online, pencegahan dan penanganan Pornografi bagi Generasi Muda.
- Upaya Mewujudkan Indonesia dan Kalimantan Tengah yang Bersih dari Penyalahgunaan Narkotika serta sebagai salah satu Langkah preventif menyikapi situasi terkini mengenai peningkatan kasus penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di kalangan generasi muda.
- Selaras dengan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah untuk membentuk generasi muda "generasi itah" sebagai tongkat estafet Pembangunan Kalimantan Tengah, yang memiliki semangat kebangsaan, menjiwai spirit "Belom Bahadat" dan berdaya saing untuk Kalimantan Tengah Berkah, Kalimantan Tengah Maju, Kalimantan Tengah Bermartabat dalam menyambut Indonesia Emas 2045.

Gambar 1.11

Dokumentasi Kegiatan Dialog Huma Hetang Bagi Generasi Muda dengan tema "Muda, Berkarya dan Berinovasi, Menuju Kalimantan Tengah Berkah, Kalimantan Tengah Maju untuk Menyambut Indonesia Emas 2045"



- iii. Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba (Kotan) Provinsi Kalimantan Tengah dengan tema "Semangat Huma Betang, Masyarakat Bergerak Bersama Melawan Narkotika, Kalimantan Tengah Berkah, Kalimantan Tengah Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Kegiatan ini adalah kolaborasi dari Badan Kesbangpol Prov. Kalteng dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov. Kalteng.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan tersebut antara lain :

- Adanya Langkah Konkrit atau Langkah nyata kebijakan berbagai sektor pembangunan di Wilayah Kabupaten/Kota yang berorientasi pada pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Dalam kerangka mempersiapkan dan menuju Indonesia Emas 2045, perlu dilakukan edukasi secara massif dan berulang-ulang kepada Generasi Muda khususnya Usia Dini, mengenai Bahaya Narkotika;
- Di Provinsi Kalimantan Tengah, hanya ada 6 Kabupaten yang telah membuat perda Narkoba sebagai Langkah penguatan regulasi, sehingga mendorong untuk Kabupaten/Kota yang belum membuat perda narkoba untuk segera menindaklanjuti;
- Membentuk Tim terpadu P4GN, yg merupakan gabungan dari forkopimda, instansi vertikal dan OPD terkait, agar setiap komponen / stakeholder dapat melakukan Pencegahan ataupun pemberantasan Narkotika sesuai dengan Tusi nya masing-masing;
- Bahwa keterlibatan semua stakeholder baik Pemerintah Daerah, ormas, TP PKK untuk dapat

membuat rencana aksi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, dimana Rencana Aksi tersebut, agar dapat diimplementasikan sehingga tidak hanya sekedar rencana tapi menjadi aksi nyata;

- Sinergitas dan kerjasama yang Responsif, Komprehensif dan Integratif antara Pemerintah Daerah bersama dengan elemen/lapisan Masyarakat dimulai dari Penguatan Ketahanan Keluarga dan Penguatan Ketahanan Masyarakat, agar Pemerintah Daerah Tanggap Terhadap Ancaman Penyalahgunaan Narkotika.

Gambar 1.12

Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan dan Penibinaan Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba (Kotakab Tanggan) Provinsi Kalimantan Tengah.



iv. Dialog Ketahanan Ekonomi Bagi Generasi Muda provinsi Kalimantan Tengah

Ketahanan ekonomi merupakan kemampuan untuk bertahan, tetap stabil, beradaptasi terhadap perubahan, dan menjaga keberlanjutan pembangunan. Ketahanan ini dapat dilihat dari dua indikator utama, yaitu kemandirian ekonomi dan kesejahteraan ekonomi. Untuk menuju ketahanan ekonomi, ada tiga tahapan penting yang harus kita pahami:

- Ketahanan diri ekonomi – kemampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
- Ketahanan daerah – terwujud ketika masyarakat secara luas telah mandiri secara ekonomi, sehingga daerah menjadi tangguh menghadapi berbagai tantangan.
- Ketahanan nasional – tercapai ketika seluruh daerah kuat secara ekonomi, yang pada akhirnya menopang kekuatan bangsa di tengah persaingan global.

Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah menggelar “Dialog Ketahanan Ekonomi Generasi Muda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025” untuk membahas penguatan ketahanan ekonomi daerah di tengah tantangan global. Dialog ini menekankan pentingnya membangun generasi muda yang berdaya saing untuk mencapai ketahanan daerah dan nasional, serta mewujudkan visi Kalimantan Tengah Berkah. Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang peserta.

Poin-poin utama dialog:

- Penguatan ketahanan daerah:

Kegiatan ini merupakan bagian dari visi gubernur untuk memperkuat ketahanan daerah guna mengantisipasi perubahan global.

- Fokus pada generasi muda:

Dialog ini secara khusus menggarisbawahi peran generasi muda sebagai penerus pembangunan bangsa, termasuk pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan.

- **Pembangunan SDM:**

Kegiatan ini sejalan dengan program pembangunan SDM yang diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, sehat, dan berdaya saing.

- **Tujuan:**

Dialog ini bertujuan untuk menjadi momentum bertukar pikiran, membangun jejaring, dan merumuskan langkah konkret untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah.

- **Harapan:**

Diharapkan melalui kolaborasi dan kerja sama, dapat terwujud Kalimantan Tengah yang Berkah dan Maju.

Gambar 1.13

Dokumentasi Kegiatan Dialog Ketahanan Ekonomi bagi Generasi Muda Provinsi Kalimantan Tengah



v. **Rapat Koordinasi Penyusunan Indeks Harmoni dan Indeks Kinerja Ormas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.**

Kalimantan Tengah adalah rumah bagi berbagai suku, agama, dan budaya. Dengan semangat Huma Betang, masyarakat diajak untuk hidup saling menghargai, bergotong-royong, dan menjaga persatuan. Penyusunan

Indeks Harmoni dan Indeks Kinerja Ormas akan menjadi panduan penting untuk memastikan bahwa keberagaman menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan, serta mendorong ormas agar semakin profesional, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan, rekomendasi, dan langkah konkret yang dapat diterapkan di semua wilayah Kalimantan Tengah dan menjadi bagian dari proses perjalanan menuju Kalimantan Tengah Berkah, Kalimantan Tengah Maju, dan ikut berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Peserta yang hadir pada kegiatan ini berjumlah 100 (seratus) orang yang terdiri dari Kepala Badan, Pejabat Administrator, Fungsional Teknis yang membidangi Organisasi Kemasyarakatan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Fungsional Teknis Penyusunan Indeks Kinerja Utama Pada Bappeda Kabupaten / Kota se Kalimantan Tengah.

Dua materi utama yang disampaikan dalam diskusi adalah :

- Penyusunan Indeks Harmoni Indonesia (IHI) Wilayah Kalteng oleh Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama Ditjen Polpum Kemendagri.
- Isu Terkini Bidang Ormas serta Overview Layanan Administrasi Pendaftaran Ormas (SiOrmas dan SiUla) dan Indeks Kinerja Ormas oleh Direktur Ormas Ditjen Polpum Kemendagri.

Gambar 1.14
Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Indeks Harmoni dan Indeks Kierfa
Genus Provinsi Kalimantan Tengah



- vi. Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah turut berperan dalam meningkatkan ketahanan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan (IPOLEKSOSBUDKAM) melalui ruang dialog kebersamaan dalam keberagaman antar mahasiswa, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Tengah turut berperan dalam membangun karakter generasi muda yang cerdas, unggul, dan berdaya saing Kegiatan "Huma Betang goes to campus" menjadi wadah untuk menanamkan semangat kebangsaan yang menjiwai nilai-nilai Selom Bahadat serta falsafah Huma Betang sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kegiatan Dialog Kebersamaan dalam Keberagaman "Huma Betang goes to Campus" Tahun 2025 dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bidang Ketahanan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas, dengan tema "Generasi Muda Berintegritas, Berdampak Nyata dan Membangun Masa

Depan yang Hebat,* yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 November 2025 bertempat di Auditorium Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Jalan G. Obos No.30, Palangka Raya. Peserta yang hadir pada Kegiatan Dialog Kebersamaan dalam Keberagaman sebanyak 300 orang terdiri dari Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Harapan dari kegiatan ini adalah Sebagai implementasi dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4789/59 tanggal 26 November 2012 tentang Pemantapan Ketahanan Ekonomi di Daerah, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi generasi muda agar siap menghadapi tantangan global. Memberikan ruang dialog bagi generasi muda untuk memperkuat semangat kebangsaan, nilai - nilai Belom Bahadat, dan falsafah Huma Betang dalam kehidupan bermasyarakat.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2025, sesuai dengan DPPA Nomor DPPA/A.3/1.05.8.01.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal 22 Oktober 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah memiliki anggaran sebesar Rp37.226.748.895,99,-. Realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2025 per Program sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
			Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Peningkat Urutan Pemerintah Daerah Provinsi	13.149.588.519,55	11.960.019.813,00	90,95
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.962.314.000,00	3.275.209.857,00	82,66
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik	10.627.889.000,00	10.342.020.823,00	97,31

	dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.244.153.297,00	831.455.776,00	66,83
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	6.750.686.294,23	6.102.140.730,00	90,39
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.492.175.765,31	887.156.150,00	59,45
Total		37.226.748.895,99	33.398.087.151,00	89,72

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan disusun sebagai gambaran pencapaian kinerja suatu Perangkat Daerah dan merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 dalam kategori baik, namun harus diakui masih terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

1. Target persentase penyelesaian konflik tidak tercapai, penyebabnya adalah upaya penyelesaian permasalahan yang dapat menimbulkan potensi konflik memerlukan waktu yang tidak sebentar dan tergantung kesepakatan pihak-pihak yang terkait.
2. Ketersediaan sumber daya baik kuantitas maupun kualitas masih menjadi tantangan tersendiri dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
3. Masih lemahnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala.

Guna meningkatkan kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran berikutnya akan melaksanakan beberapa hal, antara lain :

1. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi untuk membangun kesamaan dan kesatuan data dengan sumber atau penyedia data, baik OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan

Tengah maupun lembaga-lembaga vertikal yang ada, antara lain Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Imigrasi, Departemen Agama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri;

2. Bimtek dan rapat koordinasi internal untuk peningkatan kompetensi SDM dan komitmen pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala sesuai dengan jadwal rencana kegiatan yang telah dibuat dan disesuaikan dengan jadwal anggaran kas yang disusun untuk tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 disusun, dengan harapan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana berakuntabilitas sesuai amanat yang telah diemban dan menjadi sarana umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah di masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Palangka Raya, Januari 2026

Pt. KEPALA BADAN



MUHAMAD RUS'AN, S.Hut, M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730923 200312 1 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A. S Nomor 03 Palangka Raya 73111
Teleponi (0536) 3221177 – 3221792 FAX (0536) 3221644

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, S.E.,M.M**

Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**

Jabatan : **GOVERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

GOVERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Palangka Raya, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN,



Tanda tangan secara elektronik oleh

H. SUGIANTO SABRAN SJP



Tanda tangan secara elektronik oleh :

Dr. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, S.E.,M.M
Pembina Utama Madia
NIP. 196610221993081001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S Nomor 03 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3221177 – 3221792 FAX (0536) 3221644

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah	Nilai / Angka	79 %
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Penguasaan Organisasi Kemasyarakatan.	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif	Persen	90 %
3.	Tertaksennanya Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan.	orang	200 Orang
4.	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional & Meningkatnya Kualitas & Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOBBUD yang telah ditangani (Persentase kasus yang telah ditangani)	Persen	90 %
5.	Tertaksennanya Pembinaan & Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, & Budaya.	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	orang	200 Orang

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 17.932.428.500,00	
2. Program Pemberdayaan dan Penguasaan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 947.791.253,92	
3. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 3.300.385.667,00	
4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.742.580.578,00	
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 9.437.596.901,73	

Pihak Kedua,

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Palangka Raya, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

H. SUGIANTO SABRAN S.IP

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

D. MUHAMMAD KETMA F. DIRUN, S.E., M.M
Pembina Utama Madia
NIP. 196510221993081001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A S No. 003 Palangka Raya 73111/73112
Telp. (0536) 3221177 dan Fax (0536) 3221644

RENCANA AKSI PELAPORAN KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. M. KATMA F. DIRUN, S.E., M.M.

Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

Berjanji akan membuat Laporan Capaian Kinerja per Triwulan (Laporan Triwulan) sesuai dengan Dokumen Rencana Aksi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja ini sebagai pengendalian dan pemantauan progres kemajuan kinerja selama satu tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami bersama.

Palangka Raya, Januari 2025

KEPALA BADAN,

Dr. M. KATMA F. DIRUN, S.E., M.M.

NIP. 19661022 199305 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A S No. 003 Palangka Raya 73111/73112

Telp. (0536) 3221177 dan Fax (0536) 3221644

A. Target Realisasi Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2025	TARGET REALISASI KINERJA				KET.
					TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	
1.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Politik	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah	Nilai Angka	79,00	-	-	-	79,00	
2.	Meningkatnya Jumlah Ormas/LSM Yang Terlibat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OGP aktif	Persen	90%	-	-	-	90%	
3.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan	orang	200	-	100	100	-	
4.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Pencegahan Konflik (POLEKSOSBUD)	Potensi terjadinya konflik terkait (POLEKSOSBUD) yang telah diupayakan (Persentase kasus yang telah diupayakan)	Persen	90%	-	-	-	90%	
5.	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	orang	200	-	50	100	50	

B. Target Realisasi Keuangan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET REALISASI KEUANGAN (Rp)			
				TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV
1.	Program Peningkatan Peran Partisipatif Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		17.932.426.500	8.617.075.276	141.505.118	197.959.201	8.775.886.905
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik	17.932.426.500	8.617.075.276	141.505.118	197.959.201	8.775.886.905
2.	Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan		947.791.253,92	331.041.044	301.802.213	170.489.326,82	144.678.670
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan	947.791.253,92	331.041.044	301.802.213	170.489.326,82	144.678.670



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A S No. 003 Palangka Raya 73111/73112

Telp. (0536) 3221177 dan Fax (0536) 3221644

A. Target Realisasi Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2023	TARGET REALISASI KINERJA				KET.
					TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	
1.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Politik	Skor (Di Aspek' Has-Has' Politik Provinsi Kalimantan Tengah	Nilai / Angka	75,00	-	-	-	75,00	
2.	Meningkatnya Jumlah Ormas/LSM Yang Terlibat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif	Persen	90%	-	-	-	90%	
3.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan	orang	200	-	100	100	-	
4.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Pencegahan Konflik (POLEKSOSBUD)	Potensi terjadinya konflik terkait (POLEKSOSBUD) yang telah dianggotai (Persentase kasus yang telah dianggotai)	Persen	90%	-	-	-	90%	
5.	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	orang	300	-	50	100	50	

B. Target Realisasi Keuangan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET REALISASI KEUANGAN (Rp)			
				TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV
1.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		17.932.425.600	8.817.075.275	141.505.118	197.959.201	6.775.886.505
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penguatan Situasi Politik	17.932.425.600	8.817.075.275	141.505.118	197.959.201	6.775.886.505
2.	Program Pembentayan Dan Pengayatan Organisasi Komasyarakatan		947.791.253,92	331.041.044	301.502.213	170.469.326.92	144.678.070
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pembentayan dan	947.791.253,92	331.041.044	301.502.213	170.469.326.92	144.678.070

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET REALISASI KEUANGAN (Rp)			
				TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV
		Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					
3.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		3.308.385.887	184.397.289	925.313.228	2.098.490.410	92.184.760
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.308.385.887	184.397.289	925.313.228	2.098.490.410	92.184.760
4.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		1.742.580.578	386.518.722	662.162.034	427.525.917	296.354.905
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.742.580.578	386.518.722	662.162.034	427.525.917	296.354.905
5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		1.512.060.250	320.855.337	524.571.206	447.457.941	218.865.566
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	9.437.598.001,73	607.091.479,73	1.262.605.223	3.575.000.000	3.792.900.189

Palangka Raya, Januari 2025

KEPALA BADAN,



Dr. M. KATMA F. DIRUN, S.E., M.M.

NIP. 19661022 199308 1 001

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

